

# MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI 32 KOTA BANDA ACEH

**Ery Wati**

*Mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Syiah  
Kuala Banda Aceh*

## **Abstract**

*The inclusive program of the State Primary School 32 Banda Aceh will be successful if it is supported by human resources professionally in carrying out school operational. This study aims at knowing the inclusive education program, inclusive educational implementation management and the encountered obstacles in the implementation of inclusive education management at SD Negeri 32 Banda Aceh. This research uses descriptive qualitative method. The techniques of collecting data were observations, interviews, and documentations. The subject of the research were school head master, vice of school head master, class teacher supervisor, special teacher assistant, and parents. The results of the research shows that 1) The school head master program in implementing inclusive education is through conducting training delivery to the teachers, accepting the students ABK, modifying curriculum and affording school infrastructure in accordance with the needs of the students. 2) The implementation of inclusive education management can be seen from the number of students with special needs in academic year 2009/2010 that out of 19 students possessing one special teacher assistant, the curriculum being modified based on the students need. 3) The constraints of inclusive education programs are education funding, insufficient facilities and infrastructure, and lack of teacher special assistants..*

## **Abstrak**

*Program pendidikan inklusi di Sekolah Dasar SD Negeri 32 Kota Banda Aceh akan berhasil apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional di dalam melaksanakan operasional sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pendidikan inklusi, implementasi manajemen pendidikan inklusi dan kendala yang dihadapi dalam implementasi manajemen pendidikan inklusi di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru pendamping khusus dan orang tua murid. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Program kepala sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusi diimplementasikan dalam pemberian pelatihan kepada guru-guru, penerimaan peserta didik ABK, memodifikasikan kurikulum serta mengupayakan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan peserta*

didik. 2) Implementasi dari manajemen pendidikan inklusi dapat dilihat dari jumlah siswa berkebutuhan khusus pada tahun ajaran 2009/2010 berjumlah 19 orang, mempunyai 1 (satu) tenaga guru pendamping khusus, serta kurikulum yang sudah dimodifikasi menurut kebutuhan peserta didik. 3) Kendala dari program pendidikan inklusi adalah pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana belum memadai serta kurangnya tenaga guru pendamping khusus.

**Kata Kunci:** *anak berkebutuhan khusus, manajemen, pendidikan inklusi*

## PENDAHULUAN

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing. Namun demikian ternyata di Banda Aceh masih banyak ABK yang belum mendapatkan hak dasar pendidikan khususnya bagi ABK yang tinggal berjauhan dari SLB, selain itu sebagian besar orang tua termasuk dalam golongan ekonomi lemah.

Dalam rangka menanggulangi hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu terobosan berupa pemberian kesempatan dan peluang kepada anak-anak berkelainan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum. Pola pendidikan seperti ini disebut pendidikan inklusi. Hal ini sesuai dengan Permen Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1 yang berbunyi:

Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Dari Permen di atas tanpa k jelas bahwa ABK berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan Sekolah Dasar reguler /umum yang tinggal di lingkungan sekitar sekolah tersebut.

Dalam rangka mendukung program pendidikan inklusi di Aceh maka Pemerintah Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Qanun ini khususnya Pasal 33 Ayat 4 dikemukakan: "Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap peserta didik untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan dengan menyediakan layanan yang memadai untuk pendidikan biasa dan pendidikan inklusi".

Dengan adanya qanun tersebut maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Aceh untuk menunjuk sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi. Adapun sekolah tersebut adalah: SD Negeri 1, SD Negeri 3, SD Negeri 22, SD Negeri 25, SD Negeri 32, SD Negeri 53, SD Negeri 54, MIN Lhong Raya dan SD Negeri 57 Banda Aceh.

Meskipun sudah banyak Sekolah Dasar yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi, tetapi dalam implementasinya masih banyak yang tidak sesuai dengan konsep-konsep yang mendasar, bahkan tidak jarang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan praktek terutama terkait dengan aspek pemahaman, kebijakan internal sekolah, kurikulum, serta tenaga kependidikan dan pembelajarannya. Bahkan seperti diberitakan oleh beberapa media massa di Aceh bahwa sekolah dasar yang sudah ditunjuk menjadi sekolah inklusi menolak untuk menerima anak berkebutuhan khusus dikarenakan belum adanya guru yang profesional, hal ini sesuai yang dikatakan oleh Poppy:

Meskipun Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh telah mengeluarkan SK dan menunjuk sembilan SD di Banda Aceh untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus, namun sebagian besar sekolah-sekolah itu menolak menerima anak-anak tersebut . Banyak orang tua anak berkebutuhan khusus mengeluh karena anaknya ditolak bersekolah di sekolah inklusi. SD yang mau menerima anak *special needs* di Banda Aceh hanya SD 54 Tahija di Jeulingke. Sedangkan delapan sekolah lain menolak dengan berbagai alasan, salah satunya tidak punya guru khusus untuk mendidik anak *special needs* itu<sup>1</sup>

Permasalahan di atas tentu saja menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh sebab itu artikel berikut akan menguak beberapa aspek penting terkait dengan pelaksanaan dan kendala pendidikan inklusi di Banda Aceh.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “Suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan stuasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara

---

<sup>1</sup>[www.serambinews.com/.../sd-inklusi-tolak-terima-anak-berkebutuhan-khusus](http://www.serambinews.com/.../sd-inklusi-tolak-terima-anak-berkebutuhan-khusus) diakses tanggal 23/05/2009.

benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah”.<sup>2</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 32 Banda Aceh selama 3 bulan terhitung dari tanggal 1 Oktober sampai 1 Desember 2010. Subyek penelitian dipilih berdasarkan tujuan tertentu dari peneliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Setyosari, “sampel purposif (*purposive sampling*) diambil oleh peneliti apabila memiliki alasan-alasan khusus berkenaan dengan sampel yang akan diambil”.<sup>3</sup> Subyek penelitian ini meliputi: 1 orang kepala sekolah, 1 wakil kepala sekolah, 2 orang guru kelas, 1 guru pendamping khusus, dan 2 orang tua murid.

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian bertitik tolak dari pendapat Santori dan Aan, yakni “pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik observasi, wawancara dan kajian dokumentasi”.<sup>4</sup> Setelah data terkumpul kemudian peneliti menganalisisnya secara kualitatif.

## KAJIAN PUSTAKA

### Konsep Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan pada prinsipnya merupakan suatu bentuk penerapan manajemen atau administrasi dalam mengelola, mengatur dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan merupakan alat untuk mengintegrasikan peranan seluruh sumberdaya, guna tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu konteks sosial tertentu. “Manajemen merupakan proses, terdiri atas kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai tujuan kerjasama (administrasi) secara efisien”.<sup>5</sup>

Pendapat di atas juga didukung oleh Usman, yang mengemukakan pengertian manajemen pendidikan sebagai “seni dan ilmu pengelola sumber daya

---

<sup>2</sup>Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, hal. 25.

<sup>3</sup>Setyosari, Punaji, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hal. 192.

<sup>4</sup>Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian...*, hal.186.

<sup>5</sup>Bafadal, Ibrahim, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hal. 39.

pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien”.<sup>6</sup> Karena itu manajemen merupakan tugas pimpinan dalam menggerakkan berbagai sumber yang ada ke arah sasaran yang ingin dicapai.

## Pendidikan Inklusi

Prinsip dasar pendidikan inklusi adalah bahwa semua anak harus memperoleh kesempatan untuk bersama-sama belajar dan mengakomodir kebutuhan-kebutuhannya tanpa ada diskriminasi apapun yang mendasari. Hal ini berarti sekolah reguler/umum harus dilengkapi untuk dapat melihat dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa yang heterogen, termasuk mereka yang secara tradisional telah tersingkirkan, baik dari akses sekolah maupun peran serta yang ada di sekolah. Menurut Smith, tujuan pendidikan bagi siswa yang memiliki hambatan adalah keterlibatan yang sebenarnya dari tiap anak dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Inklusi dapat berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan interaksi sosial dan konsep diri (visi – misi) sekolah.<sup>7</sup> Dengan demikian, pendidikan inklusi berarti bahwa sekolah dan pendidikan harus mengakomodasi dan bersikap tanggap terhadap peserta didik secara individual inklusivitas ini tergantung sekolah, guru dan seluruh pelajar.

Manajemen sekolah inklusi memberikan kewenangan penuh kepala sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen– komponen pendidikan suatu sekolah yang meliputi siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan dan hubungan antara masyarakat dan sekolah.

Sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu sekolah inklusi merupakan tempat setiap anak diterima,

---

<sup>6</sup>Usman Husaini, *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal. 12.

<sup>7</sup>Smith, J. D, *Inklusi: Sekolah Ramah Untuk Semua*, Bandung: Nuasa, 2009, hal. 45.

menjadi bagian dari kelas maupun dengan anggota masyarakat lainnya agar kebutuhan individu dapat terpenuhi.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian sekolah inklusi di atas maka kepala sekolah dituntut untuk membuat sebuah perencanaan yang matang agar tercapai tujuan yang diharapkan.

## PEMBAHASAN

### Program Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah bersama dengan guru-guru penyusunan program pendidikan inklusi, di mana semua perencanaan telah tersusun di dalam program. “Perencanaan merupakan penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijaksanaan, program, proyek, metode, cara, anggaran dan sebagainya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan”.<sup>9</sup>

Langkah awal yang dilakukan oleh kepala SD Negeri 32 adalah mengirimkan utusan dari sekolah beberapa orang guru bidang studi dan wali kelas untuk mendapatkan pelatihan dari Dinas PPO Kota Banda Aceh. Setelah mengikuti pelatihan para guru terjun ke lingkungan masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang program pendidikan inklusi.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi akan mengarah kepada usaha meningkatkan mutu pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh guru dalam melaksanakan tugasnya secara operasional. Untuk itu kepala sekolah SD Negeri 32 Kota Banda Aceh sebulan sekali melakukan supervisi sekolah yang memungkinkan kegiatan operasional itu berlangsung dengan baik. Hal ini senada dengan pendapat Makawimbang:

Supervisi adalah suatu usaha menstimulir, mengkoordinir dan membimbing secara kontinyu pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individual, maupun secara kolektif agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran dengan demikian mereka dapat

---

<sup>8</sup>Depdiknas, PLB, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007, hal. 4.

<sup>9</sup>Usman Husaini, *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hal. 20.

menstimulir dan membimbing pertumbuhan tiap-tiap murid secara kontinyu, serta mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern.<sup>10</sup>

Supervisi yang telah dilakukan untuk mengevaluasi kembali terhadap apa yang telah direncanakan dan dari hasil evaluasi maka akan didapatkan kelemahan atau kekuatan dari program pendidikan inklusi yang telah terlaksana di SD negeri 32 Kota Banda Aceh.

### **Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh.**

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan manajemen pendidikan di SD Negeri 32 dalam bidang :

#### **a. Kurikulum**

Guru mata pelajaran telah memodifikasikan kurikulum sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik.

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun demikian karena keragaman hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat, maka dalam implementasinya, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik.<sup>11</sup>

Jadi kurikulum yang digunakan pada kelas inklusi adalah sama dengan kurikulum reguler.

#### **b. Peserta didik**

Peserta didik berkebutuhan khusus pada tahun ajaran 2009/2010 di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh berjumlah 19 orang. Adapun sistem penerimaan peserta didik dilakukan secara penyuluhan/promosi. Hal ini sesuai dengan pendapat Imron, “sistem promosi adalah penerimaan peserta didik, yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi”.<sup>12</sup> Karena itu, mereka yang mendaftar menjadi peserta didik, tidak ada yang ditolak.

---

<sup>10</sup>Makawimbang, Jerry H., *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfa Beta, 2011, hal. 72.

<sup>11</sup>Depdiknas, PLB, *Pedoman Umum ...*, hal. 18.

<sup>12</sup>Imron, Ali, *Manajemen Peserta Didik Barbaiz Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hal. 44.

### c. Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Menurut pengamatan peneliti selama 3 bulan di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh ikatan sosial antara orang tua murid sangat tinggi. Hal ini terlihat pada saat jam pulang sekolah di mana anak berkebutuhan khusus yang menggunakan kursi roda untuk naik kendaraan orang tuanya, tak jarang mendapatkan bantuan. Pada saat pertemuan dengan komite beberapa orang tua siswa menyumbang alat bantu seperti tongkat dan buku-buku yang dapat digunakan oleh ABK.

## Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi

### a. Pembiayaan Pendidikan

Hasil observasi didapatkan bahwa sarana dan prasarana di SD Negeri 32 masih kurang bisa diakses. Terkait hal ini pihak sekolah memberikan alasan karena belum teralokasikan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana sekolah.

Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama komponen lain. Menurut Hasbullah, pembiayaan pendidikan adalah "kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan".<sup>13</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, perlu dialokasikan pembiayaan khusus, yang antara lain untuk keperluan: (1) Kegiatan asesmen input siswa. (2) Modifikasi kurikulum. (3) Insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat. (4) Pengadaan sarana-prasarana. (5) Pemberdayaan peranserta masyarakat, dan (6) Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.

### b. Tenaga Guru Pendamping Khusus

Tenaga guru pendamping khusus hanya terdapat 1 orang sementara anak kebutuhan khusus yang memerlukan pendamping berjumlah 4 orang yang sangat mendesak dan 13 orang yang butuh pelayanan ringan.

Adapun tugas GPK adalah:

- a. Memberikan bantuan berupa layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedial ataupun pengayaan.

---

<sup>13</sup>Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 122.



- b. Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus jika terjadi pergantian guru.
- c. Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus.
- d. Melaksanakan asesmen bersama team untuk mendiagnosa permasalahan belajar ABK.
- e. Membuat silabus, kurikulum, dan evaluasi yang disesuaikan dengan kemampuan anak.<sup>14</sup>

Di samping tugas–tugas tersebut, tujuan dari guru pendamping adalah “membantu mengatasi segala kesulitan yang dihadapi siswa sehingga terjadi proses belajar-mengajar yang efektif dan efisien ”.<sup>15</sup>

#### **c. Sarana dan Prasarana**

Dari hasil observasi peneliti di SD Negeri 32 kota Banda Aceh tidak terlihat sarana dan prasarana yang mendukung program pendidikan inklusi. Sarana dan prasarana pendidikan dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk menjelaskan pesan yang disampaikan guru. Sarana dan prasarana pendidikan juga berfungsi sebagai alat pembelajaran individual di mana kedudukan sarana dan prasarana pendidikan sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang dikemukakan di atas, selanjutnya peneliti akan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Program kepala sekolah dalam menyukseskan pendidikan inklusi di SD Negeri 32 kota Banda Aceh merupakan program yang sangat penting dan program tersebut didukung oleh semua staf di SD Negeri 32 kota Banda Aceh. Program pendidikan inklusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar

---

<sup>14</sup>Depdiknas, PLB, *Pedoman Umum ...*, hal. 21.

<sup>15</sup>Soejipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 66.

- kepada anak berkebutuhan khusus dalam bidang pendidikan, jadi tidak ada lagi anak berkebutuhan khusus yang tidak sekolah.
2. Terkait dengan implementasi program pendidikan inklusi di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh, kepala sekolah telah mengupayakan pelaksanaan program yang telah disusun. Hal ini dapat diketahui melalui kegiatan perencanaan pembuatan program, pelaksanaan program, serta pengawasan program yang dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil dari Dinas PPO Kota Banda Aceh. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program pendidikan inklusi ini berjalan di dalam kelas (kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran dan guru pendamping khusus), dan juga untuk memberikan penilaian baik yang telah tercapai maupun yang belum tercapai.

Hambatan dalam melaksanakan pendidikan inklusi di SD Negeri 32 kota Banda Aceh meliputi: pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga guru pendamping khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, Z., *Memahami Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus*, Makalah diterbitkan, Bandung: Jurusan PLB FIP UPI, 2005.
- Bafadal, Ibrahim, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Depdiknas, PLB, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- <http://rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=18636&tit=Berita%20Utama%20-%20%20Sekolah%20Inklusi%20Pilihan%20Tepat>
- Imron, Ali, *Manajemen Peserta Didik Barbaiss Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Makawimbang, Jerry H., *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfa Beta, 2011.
- Minarti, Sri, *Manajemen Sekolah*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 70, *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi*, 2009.
- Qanun Aceh Nomor 5, *Tentang Penyelenggaraan Pendidikan*, Banda Aceh, 2008.
- Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Setyosari, Punaji, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Smith, J. D, *Inklusi: Sekolah Ramah Untuk Semua*, Bandung: Nuasa, 2009.
- Soejipto dan Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Undang-Undang Nomor 20, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 2003.
- Usman Husaini, *Manajemen Teori Praktik dan Rccet Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- [www.serambinews.com/.../sd-inklusi-tolak-terima-anak-berkebutuhan-khusus](http://www.serambinews.com/.../sd-inklusi-tolak-terima-anak-berkebutuhan-khusus)  
diakses tanggal 23/05/2009